

**KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM (1900-1942)**



**Oleh:**

**MAFTUH, S.Pd.I**

**NIM. 07.223.784**

**TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh**

**Gelar Magister Studi Islam**

**dalam Ilmu Agama Islam Program Studi Pendidikan Islam**

**Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam**

**YOGYAKARTA**

**2009**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

N a m a : **Maftuh, S.Pd.I**

N I M : 07.223.784

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 November 2008



Saya yang menyatakan,

**Maftuh, S.Pd.I**  
NIM. 07.223.784



DEPARTEMEN AGAMA RI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

TESIS berjudul : KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM  
(1900-1942)

Nama : Maftuh, S.Pd.I., M.Si  
NIM : 07.221.784  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam  
Tanggal Ujian : 8 Mei 2009

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 12 Mei 2009



Direktur

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain  
NIP. 150178204

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

N a m a : **Maftuh, S.Pd.I**

N I M : 07.223.784

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 November 2008



Saya yang menyatakan,

**Maftuh, S.Pd.I**  
NIM. 07.223.784

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini saya:

N a m a : **Maftuh, S.Pd.I**

N I M : 07.223.784

Jenjang : Magister

Program Studi : Pendidikan Islam

Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

menyatakan bahwa Naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 2008

Saya yang menyatakan,

**Maftuh, S.Pd.I**  
NIM. 07.223.784



DEPARTEMEN AGAMA RI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PENGESAHAN

TESIS berjudul : KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM  
(1900-1942)

Nama : Maftuh, S.Pd.I., M.Si  
NIM : 07.221.784  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam  
Tanggal Ujian : 8 Mei 2009

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam

Yogyakarta, 12 Mei 2009

Direktur,

Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain  
NIP. 150178204

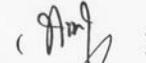
## PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

TESIS berjudul : KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM  
(1900-1942)

Nama : Maftuh, S.Pd.I., M.Si  
NIM : 07.221.784  
Program Studi : Pendidikan Islam  
Konsentrasi : Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam  
Tanggal Ujian : 8 Mei 2009

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosah

Ketua : Prof. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag  
Sekretaris : Dr. H. Sumedi, M.Ag  
Pembimbing/Penguji : Dr. Alim Roswanto, M.Ag  
Penguji : Prof. Dr. Abdurrahman Assegaf, M.Ag

()  
()  
()  
()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2009

Waktu : Pukul 09.00 s.d 10.00 WIB

Hasil / Nilai : A / 3,75

Predikat : Memuaskan / Sangat memuaskan / Dengan Pujian \*

\*) Coret yang tidak perlu

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis dari Maftuh, S.Pd.I., NIM: 07.223.784 yang berjudul:

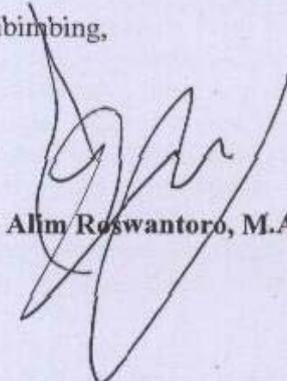
**KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA  
DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN ISLAM (1900-1942)**

saya berpendapat bahwa tesis tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Magister dalam Ilmu Agama Islam.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 November 2008

Pembimbing,

  
**Dr. Alim Roswanto, M.Ag.**

## MOTTO

*Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula  
lihat masa depan dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitarmu  
dengan penuh kesadaran  
(James Thurber)*

## ABSTRAK

Maftuh, NIM. 07.223.784, “Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam (1900-1942)”, *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008)

Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk pemerintah Hindia Belanda adalah kebijakan politik pendidikannya. Politik pendidikan bukan saja merupakan bagian dari politik kolonial akan tetapi inti dari politik kolonial tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan pokok-pokok permasalahannya sebagai berikut: 1. apa kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda? 2. faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda? dan 3. apa implikasi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi pendidikan Islam?

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan historis dan menggunakan metode *dokumenter*. Namun karena kesulitan untuk mengakses sumber-sumber dalam bentuk aslinya (sumber primer), maka kajian ini memanfaatkan hasil-hasil karya penelitian setingkat disertasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode deduktif, induktif dan meta-analisis.

Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa, kebijakan-kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kolonialnya.

Adapun faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda yang menonjol yaitu: 1. faktor politik; 2. faktor ekonomi; 3. faktor Kristenisasi; 4. faktor rasialisme; dan 5. faktor situasi dan kondisi yang terjadi di Nederland (Belanda); serta 6. faktor kondisi umat Islam Indonesia sendiri.

Sedangkan implikasi-implikasi yang ditimbulkan bagi pendidikan Islam yaitu: pada *aspek kelembagaan*, yaitu berdirinya bentuk lembaga pendidikan Islam baru yakni madrasah dengan sistem modern. Namun implikasi lainnya yaitu pesantren mendirikan lembaga pendidikannya di daerah-daerah pinggiran sebagai cermin dari sikap politik non-kooperatif ulama dengan Belanda. *Aspek kurikulum*, yaitu semula kurikulum pendidikan Islam tidak terperinci dan teratur, namun kemudian kurikulum pun disusun menjadi teratur, rinci, memiliki alokasi waktu yang jelas dan adanya kombinasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum. *Aspek metode pengajaran*, yaitu sebelumnya menggunakan sistem hafalan, bandongan/halaqah dan sorogan/individual, diganti dengan metode pengajaran yang menekankan pada pemahaman siswa dan diterapkannya sistem klasikal atau berkelas-kelas. *Aspek pendidik*, yaitu semula faktor keshalehan adalah faktor yang amat penting dalam guru agama Islam tradisional, namun bergeser dengan lebih menekankan faktor intelektual daripada unsur lainnya.

## **KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan taufiq dan hidayah serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tiada daya dan upaya selain dari Allah Swt.

Shalawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Swt. kepada nabi besar Muhammad Saw. sebagai pembawa risalah agung, bagi kemaslahatan dan keselamatan umat manusia di dunia dan akhirat.

Tesis ini ditulis dalam spektrum waktu yang membutuhkan dinamika dan kreativitas tertentu, sehingga dapat terselesaikan berkat dukungan moral-spiritual maupun material dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, sepatutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mereka yang telah berjasa dan membantu penulis, sehingga tesis ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Rasa terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah, sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Yang terhormat Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnaen, selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberi kesempatan kepada penulis selama proses penyelesaian tesis ini.
3. Departemen Agama Republik Indonesia, khususnya bagian Mapenda pusat dan Kanwil Depag Banten, yang telah memberikan kesempatan

sangat berharga untuk menikmati pendidikan strata dua (S2) di perguruan tinggi Islam yang dikenal sebagai “sarang intelektual Islam” ini. Tanpa beasiswa dan pembebasan tugas kepada penulis – yang juga sebagai abdi negara ini, mustahil rasanya membayangkan studi S2 ini terlaksana dan terselesaikan dengan baik.

4. Kepala Madrasah dan rekan-rekan guru Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah Macute Mancak, tempat penulis mengabdikan diri. Terima kasih yang tak terhingga atas kesempatannya mengizinkan penulis untuk mengikuti program beasiswa yang sangat berharga ini.
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Nizar Ali, M.Ag. selaku Ketua Program Pendidikan Islam beserta Sekretarisnya, Dr. H. Sumedi, M.Ag. Terima kasih atas segala kebaikannya dalam melancarkan persoalan-persoalan administratif dari sejak proses perkuliahan hingga rampungnya studi ini.
6. Yang terhormat Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag. yang telah memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk-petunjuknya dengan penuh kearifan dan kesabaran di tengah berbagai kesibukan, sehingga kesalahan-kesalahan serius dalam penulisan tesis ini menjadi terhindari. Di tengah kesibukannya – yang saat ini juga sebagai Ketua Program Studi Agama dan Filsafat Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, beliau masih sempat meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Abdurrahman Assegaf, M.Ag. yang telah menjadi salah seorang penguji tesis ini sehingga dengan

keahliannya di bidang kebijakan pendidikan Islam, penulis mendapat banyak sekali masukan berharga mengenai hal tersebut.

8. Segenap staf pengelola Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Kepala perpustakaan pusat UIN Sunan Kalijaga beserta stafnya dan para karyawan perpustakaan Pascasarjana. Terima kasih atas pelayanannya yang ramah dan penuh pengertian itu, sehingga memperlancar proses penyelesaian tesis ini.
10. Yang terhormat semua Guru Besar dan Dosen Pembina, yang amat terpelajar, dengan baik hati dan penuh kesabaran telah membukakan pikiran, mata dan hati penulis, dan memberikan karakter ilmiah melalui transfer ilmu dan pengalaman serta sikap dan sosok sebagai seorang intelektual. Mereka semua telah banyak menginspirasi penulis untuk senantiasa tidak boleh ada istilah berhenti berpetualang dalam mengarungi luasnya ilmu pengetahuan Allah Swt.
11. Rekan-rekan sekelas (Akidah Akhlak A) penulis, yang dengan baik hati telah memberikan motivasi dan diskusi-diskusi pentingnya selama proses perkuliahan. Mereka telah membuka mata hati penulis bahwa memang dunia ini begitu luas, sehingga terlalu naif untuk cepat merasa cukup dengan apa yang diperoleh sekarang. Rasanya tidak *afdhal* tanpa menyebut nama-nama mereka di sini. Mereka itu – berdasarkan urutan alfabetis – adalah: Ahmad Fauji, S.Ag., Ahmad Hanis Thoriq, SHI.,

Ahmad Zaidun, S.Ag., Dra. Hindatullatifah, Dra. Hj. Juwarmi, Ikhwanudin, SHI., Kasiyo, S.Ag., M. Ajib Hermawan, S.Fil.I., M. Ihsan, S.Th.I., M. Yusri FM, S.Ag., Nur Azizah, S.Ag., Oom Komaruddin, S.Ag., Syaiful Bahri, S.Ag., dan Yusuf Hasyim, S.Ag.

12. Yang terhormat dan yang tercinta Ayahanda Ajma'in, A.Ma. dan Ibunda Bahriyah, yang telah berjasa besar dalam membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang serta doa restu yang tiada henti-hentinya. Tiada kata lain yang terungkap selain sembah *sungkem* kepada keduanya. Doa-doa mereka telah menembus ruang dan waktu, sehingga terbukalah pintu-pintu rezeki untuk perjuangan ilmu dan kehidupan anaknya ini.
13. Yang terhormat Abi M. Syihabuddin Ali, yang telah memberikan doa spiritual yang sangat berguna untuk senantiasa tegar dan tenang dengan segala ujian yang datang.
14. Yang tercinta *teteh-teteh*, adik-adik, dan keponakan-keponakan serta ipar-iparku, yang juga telah ikut mendoakan penulis dalam proses penyelesaian studi ini.
15. Istri tersayang, Rohmah Fikriyah, SEI, dan permata hatiku, Aulia Nazwa Maftuh, yang telah bersabar menanggung derita sebagai akibat suami dan ayahnya menempuh studi ini. Mereka selalu saja memberikan pengertian yang sangat mengagumkan ketika harus ditinggal berdua di rumah tanpa suami dan ayahnya, selama berbulan-bulan bahkan

bilang tahun. Tanpa kesabaran, kasih sayang, dukungan dan doa-doa mereka yang tulus, mustahil rasanya penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan baik.

16. Kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya tesis ini. Kendati penulis tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa terima kasih yang mendalam kepada mereka semuanya.

Pada akhirnya, tesis ini adalah “karya bersama” dari kerja banyak orang. Namun demikian, apapun yang tidak enak dilihat, tidak mudah dicerna pikiran, dan segala kekurangan lainnya atas karya ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab penulis sendiri. Oleh karenanya, kritik dan saran yang konstruktif senantiasa penulis terima dari pembaca.

Akhirnya, penulis memanjatkan do'a semoga Allah Swt. memberi balasan kepada mereka semua dengan balasan yang setimpal. Harapan terdalam penulis, betapa pun kecilnya hasil kajian ini, semoga menambah setitik khazanah kepustakaan yang berharga. Semoga Allah Swt. meridlai semua langkah-langkah dalam penulisan karya ini sehingga memasukkannya pada nilai ibadah. *Amin.*

Yogyakarta, 9 Mei 2009

Wassalam,

**Maftuh, S.Pd.I**  
NIM. 07.223.784

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	xvii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	11
E. Kerangka Teori .....	15
F. Metode Penelitian .....	27
G. Sistematika Pembahasan .....	30

### **BAB II : KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA**

A. Kebijakan Politik Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda .....	32
B. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda dalam Jenis-jenis Lembaga Pendidikan .....	53
C. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Hindia Belanda dalam Kurikulum .....	64
D. Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia Belanda dalam Metode Pengajaran .....	79
E. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Kebijakan Politik Pendidikan Hindia Belanda .....	83

### **BAB III : KEBIJAKAN PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM**

A. Ordonansi Guru .....	110
B. Ordonansi Sekolah Liar .....	118
C. Reaksi Umat Islam Terhadap Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar .....	123

<b>BAB IV :</b>	<b>PERKEMBANGAN PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA PADA MASA PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA</b>	
	A. Pendidikan Islam Sebelum Abad Ke-20 .....	141
	B. Pendidikan Islam Awal Abad Ke-20 .....	156
	C. Lembaga Pendidikan Islam Masa Pembaharuan Awal Abad ke-20 .....	177
	D. Kurikulum Madrasah Periode Pertumbuhan .....	180
	E. Metode Pengajaran dalam Sistem Pendidikan Islam .....	184
<b>BAB V :</b>	<b>IMPLIKASI KEBIJAKAN POLITIK PENDIDIKAN HINDIA BELANDA BAGI PENDIDIKAN ISLAM</b>	
	A. Implikasi pada Kelembagaan .....	186
	B. Implikasi pada Kurikulum Pendidikan Islam .....	197
	C. Implikasi pada Metode Pengajaran .....	202
	D. Implikasi pada Pendidik (Guru Agama Islam) .....	205
<b>BAB VI :</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	210
	B. Saran-saran .....	213
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>216</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>226</b>
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>251</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Mata Pelajaran MULO, 69

Tabel 2 Mata Pelajaran AMS A1 (*Oostersch-Letterkunde*) Tahun 1939/1940, 71

Tabel 3 Mata Pelajaran AMS A2 (*Westersch Klassiek*) Tahun 1939/1940, 72

Tabel 4 Mata Pelajaran AMS B- (*Cultuurwetenschap*) Tahun 1939/1940, 74

Tabel 5 Mata Pelajaran HBS V, 75

Tabel 6 Mata Pelajaran Awaliyah Tahun 1936, 181

Tabel 7 Mata Pelajaran Madrasah Ibtidaiyah Tahun 1936, 181

Tabel 8 Mata Pelajaran Madrasah Tsanawiyah Tahun 1931, 182

Tabel 9 Mata Pelajaran Normal Islam Tahun 1931, 183

Tabel 10 Perbandingan Kualifikasi antara Guru Agama Tradisional dan Guru Agama Modern, 209

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Sistem Persekolahan Zaman Pemerintahan Hindia Belanda, 63

Bagan 2 Sistem Madrasah dan Persekolahan Zaman Pemerintahan Hindia Belanda  
Abad ke-20, 196

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perkembangan Jumlah Penduduk Hindia Belanda Tahun 1850-1930, 226
- Lampiran 2 Perbandingan Murid, Biaya, dan Satuan Biaya antara SD Eropa dengan SD Bumiputera Tahun 1883-1892, 226
- Lampiran 3 Jumlah Sekolah, Murid, Biaya, dan Satuan Biaya Tahun 1898, 227
- Lampiran 4 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru menurut Jenjang Pendidikan Tahun 1900-1940, 227
- Lampiran 5 Perkembangan Jumlah Sekolah, Murid, Biaya, dan Satuan Biaya Sekolah Dasar (Negeri dan Bersubsidi) Tahun 1909-1920, 228
- Lampiran 6 Perkembangan Jumlah Mahasiswa dan Lulusan Perguruan Tinggi Tahun 1920-1939, 229
- Lampiran 7 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Dasar Eropa (*Europeesche Lagere School*) Tahun 1900-1940, 230
- Lampiran 8 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Cina Belanda (*Holandsch Chineesche School*) Tahun 1908-1940, 230
- Lampiran 9 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Bumiputera-Belanda (*Hollandsch Inlandsche School*) Tahun 1900-1940, 231
- Lampiran 10 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Kelas II (*Inlandsche School*) Tahun 1900-1940, 231
- Lampiran 11 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Desa (*Volksschool*) Tahun 1907-1940, 232
- Lampiran 12 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Lanjutan (*Vervolgschool*) Tahun 1927-1940, 232
- Lampiran 13 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Peralihan (*Schakel School*) Tahun 1921-1940, 233

- Lampiran 14 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Menengah 5 Tahun (HBS V) Tahun 1900-1940, 233
- Lampiran 15 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Menengah 3 Tahun (HBS III) Tahun 1900-1940, 234
- Lampiran 16 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah SLTP (MULO Eropa) Tahun 1915-1940, 234
- Lampiran 17 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Sekolah Menengah Umum (AMS) Tahun 1919-1940, 235
- Lampiran 18 Perkembangan Jumlah Sekolah dan Murid menurut Status Sekolah Lycea (*Gymnasium School*) Tahun 1925-1940, 235
- Lampiran 19 Lembaga-lembaga Pendidikan Islam Tradisional dan Jumlah Murid Tahun 1831, 236
- Lampiran 20 Pesantren, Madrasah, Kyai dan Santri di Jawa dan Madura Tahun 1942, 236
- Lampiran 21 Putusan Pemerintah Belanda untuk Menjediakan Biaja Pendidikan bagi Orang Indonesia buat Pertamakalnya, 237
- Lampiran 22 Putusan Pemerintah Belanda untuk Memberikan Subsidi kepada Sekolah-sekolah di Daerah Timor, 238

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk pemerintah Hindia Belanda adalah pada kebijakan politik pendidikannya. Hal ini sebagaimana dikatakan Brugmans bahwa, politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial.<sup>1</sup> Oleh karena itu, diselenggarakannya pendidikan di Indonesia<sup>2</sup> oleh pemerintah Hindia Belanda lebih ditekankan untuk kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya sendiri. Kalaupun pada akhirnya kolonial Belanda<sup>3</sup> membuka

---

<sup>1</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Cet.II, (Bandung: Jemmars, 1987), hal. 3. Istilah “koloni” berasal dari bahasa Latin *colonia*, yang artinya tanah, tanah pemukiman atau jajahan. Sedangkan dalam arti luas, adalah pemukiman warga suatu negara di wilayah di luar negara mereka; biasanya suatu wilayah di seberang lautan, yang kemudian mereka nyatakan sebagai wilayah mereka. Istilah “kolonialisme” adalah suatu sistem di mana suatu negara menjalankan politik pendudukan atau penjajahan terhadap wilayah lain. Lihat, Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil. 3, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982), hal. 1811-1812

<sup>2</sup> Nama Indonesia pertama kali diperkenalkan oleh etnolog Inggris, G.R. Logan pada tahun 1850, ketika ia menulis buku mengenai bangsa yang tinggal di kepulauan penghasil rempah-rempah itu. Logan menggabungkan kata “India” yang waktu itu diartikan oleh kebanyakan orang Barat sebagai daerah penghasil rempah, dengan kata “nesos” yang berarti kepulauan. Dengan menggabungkan dua kata ini, terciptalah nama Indonesia. Lihat, Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jil. 7, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 74. Nama resmi negara ini hingga Perang Dunia II adalah Hindia Belanda (Inggris: *Nederlands East Indies* atau *Dutch East Indies*) atau Holan Tropika – untuk menyebut bagian Kerajaan Belanda yang beriklim tropis. Lihat, Wertheim, W.F., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial*, Alih bahasa A.F. Husein, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), hal. 11; lihat juga A Supartono dan L Rahman, “Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi”, *Kompas*, 6 Juli 2001, hal. 39. Nama lain dari Indonesia ini juga adalah Nusantara karena terdiri atas 13.667 pulau, 6044 punya nama sedang yang 7623 tidak punya nama, hanya 7 persen (931 pulau) yang didiami manusia. Lihat Ahmad Syafi’i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985, hal. 1. Dalam tulisan ini, ketiga nama ini dipakai secara bergantian dengan maksud yang sama.

<sup>3</sup> Istilah “Belanda” menunjuk ke suatu negara di wilayah Eropa yang selama 300 tahun lebih menjajah Indonesia. Negara ini terletak di Eropa Barat Laut, di tepi Laut Utara. Di Selatan, negeri itu

kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh rendahan/kasar.”<sup>4</sup>

Kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap rakyat Indonesia yang mayoritas umat Islam ini, sesungguhnya didasari oleh rasa takut mereka akan Islam. Di mata kolonial Belanda, Islam dipandang bukan saja sebagai ancaman terhadap “Kebijakan Keamanan dan Ketertiban” (*Rust en Orde*), melainkan juga terhadap masa depan keberlanjutan pendudukan dan penjajahan mereka di kepulauan Nusantara ini.<sup>5</sup>

Untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan pengaruh Islam dari rakyat jajahannya maka mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah. Gagasan Snouck Hurgronje mengenai politik asosiasinya<sup>6</sup> meyakini bahwa pendidikan Barat yang diberikan kepada rakyat jajahan akan mengalahkan Islam. Karena, menurut pandangannya, lapisan pribumi yang berkebudayaan lebih tinggi akan relatif jauh dari pengaruh Islam, sedangkan pengaruh yang akan mereka miliki

---

berbatasan dengan Kerajaan Belgia, dan di sebelah timur dengan Jerman Barat. Penduduknya sekitar 45 persen beragama Protestan, sedangkan 40 persennya Katolik. Sisanya terdiri atas berbagai agama, Islam, Budha, dan aliran kepercayaan, atau tidak beragama. Orang Belanda sendiri menyebut negaranya Nederland atau Holland. Sebutan lain yang menunjukkan keunikan negeri ini adalah: Negeri Bunga Tulip, Negeri Kincir Angin, dan Negeri Seribu Tanggul. Lihat Tim Penyusun, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jil. 3, (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989), hal. 250-251

<sup>4</sup> Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hal. 21

<sup>5</sup> Prijono, “Riwayat Penjajahan Barat dan Perlawanan Umat Islam”, dalam *Beberapa Peninggalan dari Sejarah Perjuangan Islam*, (Jakarta: t.p., 1945), hal. 73-89, sebagaimana dikutip Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998), hal. 69

<sup>6</sup> Politik asosiasi bertujuan untuk mempererat ikatan antara negeri jajahan dengan negara penjajahnya melalui kebudayaan, di mana lapangan pendidikan merupakan garapan utama. Dengan adanya asosiasi ini maka Indonesia bisa memanfaatkan kebudayaan Belanda tanpa mengabaikan kebudayaannya sendiri. Lihat, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta:LP3ES, 1985), hal. 39

akan lebih mempermudah mempertemukannya dengan pemerintahan Eropa. Pendidikan Barat, dalam analisisnya, merupakan sarana yang paling meyakinkan untuk mengurangi dan akhirnya menaklukkan pengaruh Islam di Indonesia.<sup>7</sup>

Pandangan-pandangan Snouck Hurgronje ini, menemukan momentumnya seiring dengan maksud kebijakan kolonial Belanda untuk “menyejahterakan” penduduk pribumi melalui program yang kemudian dikenal dengan Politik Etis (*Ethische Politiek*), pada tahun 1901.<sup>8</sup>

Namun, selain sasaran transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di koloni, pada saat yang sama orang-orang Belanda menyembunyikan kepentingan terselubungnya. Meskipun tak satu aspek dari kebijakan itu yang secara terang-terangan dimaksudkan untuk mempromosikan cita-cita Kristiani, namun fakta menunjukkan bahwa korelasi antara keduanya sangat kuat. Politik Etis adalah tidak lain sebagai kerangka kerja yang di atasnya konsolidasi agama Kristen di Indonesia dimapkan. Berbagai subsidi terhadap sekolah dan lembaga misi, yang semula ditolak karena dikhawatirkan akan memancing reaksi keras kaum Muslim, kini mulai diberikan secara besar-besaran. Akibatnya, pada periode awal diterapannya Politik Etis ini, pemerintah kolonial dikuasai oleh mereka yang sangat mendukung Kristenisasi daerah

---

<sup>7</sup> Harry J. Benda, “Christiaan Snouck Hurgronje dan Landasan Kebijakan Belanda Terhadap Islam di Indonesia”, dalam Ahmad Ibrahim dkk., *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, Alih bahasa A. Setiawan Abadi, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 135; Lihat juga, Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam*, hal. 43

<sup>8</sup> M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Cet.II, Alih bahasa Satrio Wahono dkk., (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), hal. 227

koloni. Kebijakan inilah akhirnya yang memicu bangkitnya berbagai gerakan politik dan sosial di Indonesia. Salah satunya adalah gerakan Muhammadiyah.<sup>9</sup>

Ketika akan mengembangkan pendidikan bagi masyarakat bumiputra, diperkirakan oleh beberapa ahli Belanda sendiri bahwa pemerintah Hindia Belanda akan memanfaatkan tradisi pendidikan rakyat yang sudah berkembang, yakni pendidikan Islam.<sup>10</sup> Tetapi secara teknis, usulan tersebut sulit dipenuhi karena tradisi pendidikan Islam waktu itu dipandang sebagai memiliki kebiasaan-kebiasaan yang dianggap jelek, baik dari sudut kelembagaan, kurikulum, maupun metode pengajarannya. Akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya, khususnya dalam rangka misionaris.

Sejak Politik Etis diterapkan, pendidikan di Indonesia mengalami kemajuan yang lebih pesat dan tidak terbatas hanya ditujukan secara eksklusif bagi kelompok-kelompok terpilih menurut ukuran Belanda. Atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutsz sistem pendidikan ini mulai juga diselenggarakan bagi masyarakat yang lebih luas dalam bentuk Sekolah-sekolah Desa.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus*, hal. 43-44

<sup>10</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet.II, (Jakarta: LP3ES, 1994), hal. 2

<sup>11</sup> Sistem persekolahan berdiri untuk pertama kalinya di Indonesia pada Masa VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* – Perserikatan Maskapai Hindia Timur). Sekolah pertama didirikan pada tahun 1607 di Ambon. Sekitar 25 tahun kemudian di wilayah itu dilaporkan sudah ada 16 sekolah, sehingga pada tahun 1645 mencapai 33 sekolah. Misi utama penyelenggaraan sekolah-sekolah itu adalah menyebarkan dan mengajarkan Protestan, Calvinisme. S. Nasution, *Sejarah Pendidikan*, hal. 4; Di Jawa, sekolah untuk pertama kalinya didirikan pada tahun 1617 di Jakarta, dan kemudian menyebar di kota-kota lain, terutama kota-kota yang menjadi benteng VOC seperti Cirebon dan Banten. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 79-80

Perkembangan sekolah yang semakin merakyat itu telah merangsang kalangan Islam untuk memberikan respon. Dalam hal ini mereka memikirkan untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang seluas-luasnya masih sangat tampak dalam politik dan kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebanyakan rakyat Indonesia bagaimanapun masih akan tetap bodoh karena tingkat pendidikan bagi mereka hanya terbatas pada sekolah rendah. Dari sudut ini, pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kecerdasan mereka atas prinsip persamaan sebagaimana yang menjadi asas ajaran Islam. Namun di sisi lain pendidikan Islam sudah saatnya untuk menawarkan pola pendidikan yang lebih maju, baik dalam hal kelembagaan, struktur materi, maupun metodologinya, sehingga dapat mengimbangi sekolah-sekolah ala Belanda.

Kesadaran untuk memperbaharui pendidikan Islam ini dimiliki oleh sejumlah tokoh, khususnya mereka yang sudah mengenyam sekaligus pendidikan Islam tradisional dan pendidikan sekolah ala Belanda. Dalam pemikiran mereka perlu ditempuh cara kombinasi yaitu mata-mata pelajaran keagamaan tetap diadakan tetapi ditambah dengan mata-mata pelajaran umum seperti membaca, menulis, berhitung, bahasa, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan dan sebagainya. Metode pendidikan pun direkayasa sedemikian rupa sehingga lebih efektif sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat. Secara konkrit di antara mereka adalah KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, mendirikan sekolah "*Mulo*

*Met de Qur'an*” dan kemudian sekolah-sekolah Islam yang dapat disebut sebagai madrasah menurut istilah teknis pendidikan Islam.<sup>12</sup>

Usaha untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang sebanding dengan sekolah ala Belanda dalam perkembangannya menjadi agenda dan gerakan Islam di Indonesia. Muhammadiyah, Nahdlatul ‘Ulama, Jami’at Khair, Persatuan Umat Islam, Persatuan Islam, al-Irsyad, al-Washliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan organisasi Islam lainnya, memiliki bagian atau seksi khusus dalam rangka pendirian madrasah-madrasah di berbagai daerah.<sup>13</sup> Dengan mendirikan madrasah, umat Islam agaknya telah memberikan respon yang cukup tepat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda, sehingga pendidikan Islam di satu sisi tidak terlalu tertinggal, dan di sisi lain tetap mempertahankan ciri-ciri keislamannya secara kuat.

Namun, di pihak lain, pemerintah Hindia Belanda agaknya juga tidak tinggal diam dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh umat Islam tersebut. Didasari oleh ketakutan akan ancaman umat Islam, ia mengeluarkan kebijakan pendidikan yang bersifat menekan dan memberatkan umat Islam.

Salah satu kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam adalah penerbitan Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*) dan

---

<sup>12</sup> Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), hal. 189; Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hal. 99

<sup>13</sup> Mahmud Yunus membahas madrasah-madrasah dalam kurun pertumbuhan ini dengan agak lebih rinci. Lihat, Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet.IV, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995)

Ordonansi “Sekolah Liar” (*Ordonantie Wildescholen*). Kebijakan pemerintah Hindia Belanda juga berlangsung dalam berbagai bentuk ketidakadilan, baik kuantitatif maupun kualitatif. Akibatnya, umat Islam selalu tertinggal dalam percaturan budaya, ekonomi, pendidikan dan politik. Hal ini terlihat dengan pemberian subsidi yang diberikan untuk umat Islam jumlahnya lebih kecil dibanding untuk umat Kristiani.<sup>14</sup>

Memang secara formal Belanda mengklaim bersikap netral terhadap agama dalam arti tidak mencampuri dan tidak memihak kepada salah satu agama,<sup>15</sup> tetapi kenyataannya pemerintah Belanda mengambil sikap diskriminatif dengan memberi kelonggaran kepada kalangan misionaris Kristen lebih banyak, termasuk bantuan uang. Pemerintah Belanda menolak memberikan subsidi kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam. Karena pemberian subsidi kepada sekolah-sekolah itu pada akhirnya hanya berhasil mengembangkan suatu sistem

---

<sup>14</sup> Sikap diskriminatif atas dasar agama ini terlihat pada sumbangan dana yang diberikan kolonial Belanda kepada umat Islam yang hanya sebesar f. 127.029, pada tahun 1917. Sedangkan sumbangan yang diberikan pemerintah Hindia Belanda, pada tahun yang sama, kepada pihak Kristen, bahkan mencapai f. 1.235.500. Jumlah ini tidak termasuk sumbangan insidental, misalnya untuk pembangunan Gereja baru dan sumbangan yang diberikan kepada sekte-sekte Kristen lain di luar Protestan dan Katolik. Lihat Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam*, hal. 33

<sup>15</sup> Deliar Noer, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet.VIII, (Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 133; Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Cet.III, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999), hal. 61; Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet.16, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 253; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hal. 86; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 23

pendidikan yang sebenarnya tidak menguntungkan pengaruh dan kewibawaan Belanda.<sup>16</sup>

Dari gambaran-gambaran ini jelas terlihat bahwa, pemerintah agaknya terus menerus berupaya untuk menggerogoti Islam, terutama melalui kebijakan-kebijakan politik pendidikannya. Peraturan pemerintah Belanda yang sedemikian ketat dan gencar itu mengesankan bahwa pendidikan Islam akan menjadi lumpuh dan porak poranda atau bahkan lenyap dari tanah Indonesia ini. Namun, ternyata sejarah mengatakan lain. Pendidikan Islam, seperti yang sampai saat ini masih dapat disaksikan eksistensinya, tetap tegar tak tergoyahkan. Agaknya tepat Wertheim, seperti dikutip Ridwan Saidi, ketika mengatakan bahwa apa pun politik terhadap Islam yang akan dilancarkan oleh kekuasaan non-Islam, hasilnya senantiasa berbeda dari apa yang ingin dikejar kekuasaan tersebut.<sup>17</sup> Tekanan demi tekanan sama sekali tidak menggoyahkan mereka.

Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dan serius mengenai kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang dikeluarkan pemerintah Hindia Belanda perlu untuk dilakukan. Apa dan mengapa mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti itu; serta apa pula implikasinya terhadap eksistensi pendidikan Islam,

---

<sup>16</sup> Menteri Jajahan pada tahun 1888 dengan terang-terangan mengatakan: "The interference of the government with the Islamic system of education and the financial support to be given to them, would only promote religious education, that in the end will not support our authority and our influence." (Campur tangan pemerintah terhadap sistem pendidikan Islam dan dukungan finansial yang diberikan kepadanya hanya akan memajukan pendidikan keagamaan, yang pada akhirnya tidak memperkuat kekuasaan dan pengaruh kita). Lihat Karel Steenbrink, "Religion and Education in a Changing Indonesia", *The Indonesian Journal for Muslim Culture*, Vol.1, No.2, 2001, hal. 17-18

<sup>17</sup> Ridwan Saidi, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, (Jakarta: Rajali, 1984), hal. 3

merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diupayakan terjawab dalam penelitian ini.

Adapun kebijakan pendidikan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peraturan resmi pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan untuk lembaga, proses dan produk pendidikannya. Kajian ini hanya mencakup kebijakan pendidikan yang diterbitkan antara kurun waktu 1900 sampai dengan 1942. Alasannya adalah bahwa, pada masa-masa tersebut pemerintah Hindia Belanda telah menggoreskan sejarah yang penting berkaitan dengan sejarah pendidikan di Indonesia dengan mengeluarkan pelbagai kebijakan seperti: Ordonansi Guru dan Ordonansi “Sekolah Liar”. Sementara di sisi lain, umat Islam pada masa-masa itu telah terjadi perubahan yang digambarkan sebagai kebangkitan, pembaharuan bahkan pencerahan (*renaissance*),<sup>18</sup> yang ditandai dengan munculnya lembaga-lembaga pendidikan yang dinamakan madrasah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari latar belakang masalah ini, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda?

---

<sup>18</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren*, hal. 26

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi munculnya kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda?
3. Apa implikasi kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi pendidikan Islam?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengungkapkan kebijakan politik pendidikan yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu
  - b. Untuk mengetahui latar belakang apa yang menyebabkan kebijakan politik pendidikan itu lahir
  - c. Untuk mengetahui implikasi-implikasi dari penerapan kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda bagi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam pada periode antara 1900 sampai dengan 1942.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat terutama dalam beberapa hal berikut:

- a. Dapat memberikan gambaran secara lebih lengkap mengenai kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang dikeluarkan oleh kolonial Belanda dan faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan tersebut lahir

- b. Dapat memberikan landasan historis dalam upaya mengembangkan sistem pendidikan Islam ke depan. Karena disadari bahwa, tanpa melihat peristiwa-peristiwa masa lalu, maka akan sulit – untuk tidak mengatakan mustahil – untuk memperbaiki sistem pendidikan yang eksis saat ini. Masa kini merupakan rangkaian-rangkaian berkesinambungan dari masa-masa lalu. Dengan demikian, untuk memahami masa kini secara lebih baik, perlu dilihat keadaannya di masa lampau
- c. Dapat memberikan sumbagan terhadap khazanah keilmuan khususnya dalam masalah pendidikan Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Terdapat beberapa kajian mengenai kebijakan pemerintah mengenai pendidikan. Demikian juga pembahasan tentang perkembangan pendidikan Islam pada masa Hindia Belanda. Kajian-kajian tersebut ada yang berupa tesis, disertasi, ataupun berbentuk buku dan artikel. Di antara karya tersebut yaitu, Noor Haris yang berjudul *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1990)*. Penelitian ini berupa tesis yang diajukan penulisnya pada tahun 2004 di UIN Sunan Kaljaga. Dalam penelitiannya ini Noor Haris menyimpulkan bahwa:

Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah kebijakan konvergensi, yaitu kebijakan yang berupaya mengintegrasikan dualisme pendidikan sebagai hasil dari pergumulan antara dualisme kekuatan politik (Islam dan Nasionalisme) sejak awal kemerdekaan. Penerapan kebijakan ini pada akhirnya tercermin pada ketetapan bahwa pendidikan agama tidak lagi

merupakan mata pelajaran pilihan, melainkan sudah menjadi mata pelajaran wajib yang harus diikuti oleh semua siswa dan mahasiswa, dan merupakan syarat kelulusan ujian akhir.<sup>19</sup>

Penelitian lainnya dilakukan oleh Abd. Rahman Assegaf dengan judul *Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1900*.

Penelitian ini merupakan disertasi penulisnya yang dipertahankan di Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004. Abd. Rahman Assegaf mengemukakan bahwa penelitiannya bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberikan analisis pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam sejak tahun 1942 sampai 1994. Di akhir penelitiannya, Abd. Rahman menyimpulkan bahwa:

Terdapat beberapa kebijakan pendidikan nasional yang menimbulkan respon sebagian kalangan masyarakat, baik dalam bentuk respon positif dalam artian mendukung kebijakan tersebut, maupun respon negatif yang berarti menolak. Respon positif masyarakat muncul apabila posisi pendidikan Islam proporsional, sesuai dengan keberagaman umat, dan tidak menghalangi keyakinan mereka. Sebaliknya, respon negatif masyarakat timbul dari peraturan yang mempersempit ruang gerak kebebasan beragama.<sup>20</sup>

Penelitian mengenai kebijakan pendidikan juga telah dilakukan oleh Muh Saerozi yang berjudul *Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*. Kajian yang berbentuk disertasi penulisnya ini, membahas tentang kebijaksanaan pendidikan agama yang sedang berlangsung di Indonesia. Dikatakan bahwa

---

<sup>19</sup> Noor Haris, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1990)", *Tesis*, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004)

<sup>20</sup> Abdur Rahman Assegaf, "Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1900", *Disertasi*, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004)

“kebijaksanaan pendidikan agama itu berpola konfesional, yang berarti bahwa negara memberikan legitimasi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan subjek didik pada setiap agama.”<sup>21</sup>

Perlu juga disebutkan karya lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini. Karya tersebut dihasilkan oleh Muhammad Sirozi dengan Judul *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989*. Karya ini merupakan terjemahan disertasi penulisnya yang diajukan pada Monash University, Melbourne-Australia pada tahun 1998, dan kemudian menjadi sebuah buku. Sebagaimana judulnya, penelitian ini hanya mempelajari peran para pemimpin Muslim dalam perumusan UUSPN atau UU No. 2, 1989 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Di dalamnya dikemukakan mengapa para pemimpin Muslim ikut serta dalam perdebatan mengenai Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional, apa sasarannya dan bagaimana mereka mengejar sasaran itu. Dan sebagaimana diakui penulisnya bahwa kajiannya dibatasi pada konteks pembentukan kebijakan dalam masa Orde Baru, 1965-1998.<sup>22</sup>

Sedangkan tulisan-tulisan yang membicarakan pendidikan Islam pada masa pemerintahan Hindia Belanda yaitu: Rasi'in, *Pendidikan Islam pada Zaman Belanda*, yang memaparkan asal mula kedatangan Belanda yang kemudian

---

<sup>21</sup> Muh Saerozi, “Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Historis atas Kebijakan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia”, *Disertasi*, (Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2003)

<sup>22</sup> Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989*, Alih bahasa Lillian D. Tedjasudhana, (Jakarta: INIS, 2004)

mendirikan banyak sekolah dengan maksud menghasilkan pegawai murah. Rasi'in pun secara sekilas membahas tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda dan sikap umat Islam dalam meresponi kebijakan tersebut.<sup>23</sup>

Karya lainnya adalah Jalaluddin, *Kapita Selektta Pendidikan: Suatu Telaah Konsep Pembaharuan di Zaman Kolonial Belanda*, yang menggambarkan pembaharuan-pembaharuan pendidikan di Indonesia pada permulaan abad ke-20 dengan terlebih dahulu menelusuri secara selintas tentang sistem peralihan Hindu Islam, langgar dan pesantren.<sup>24</sup>

Berdasarkan penelusuran dari karya-karya di atas, penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan karya-karya tersebut. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan kebijakan-kebijakan pendidikan yang diterbitkan pemerintah Hindia Belanda pada masa penjajahannya, untuk kemudian dilihat bagaimana implikasinya terhadap perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam pada waktu itu. Tulisan yang dihasilkan Rasi'in mengenai perkembangan pendidikan Islam belum menggambarkan implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan-kebijakan politik pendidikan Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam. Kemudian Ras'in juga tidak membahas sama sekali mengapa kebijakan-kebijakan tersebut keluar. Sementara karya Jalaluddin juga hanya

---

<sup>23</sup> Rasi'in, "Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Belanda", dalam Abuddin Nata (Ed.), *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa Bandung, 2003), hal. 8

<sup>24</sup> Jalaluddin, *Kapita Selektta Pendidikan: Suatu Telaah Konsep Pembaharuan di Zaman Kolonial Belanda*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990)

mengungkapkan pembaharuan-pembaharuan pendidikan pada masa itu, dengan tidak menyebutkan kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda.

## E. Kerangka Teori

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*policy*”. Dalam studi ilmu politik, kata tersebut selalu dirangkai dengan kata lain sehingga membentuk suatu makna lain, misalnya *policy studies* yang termasuk di dalamnya *policy research* dan *policy evaluation*. Dalam studi ilmu ekonomi, kesehatan, pertanian dan pekerjaan sosial dikenal dengan istilah “*studies policy*”.<sup>25</sup>

Kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>26</sup> Noeng Muhadjir menjelaskan bahwa kebijakan adalah alternatif yang diambil atas pengkajian terhadap sesuatu masalah.<sup>27</sup> Jadi kebijakan selalu mengandung keputusan-keputusan,<sup>28</sup> di mana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal;

---

<sup>25</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi Kebijakan*, (Yogyakarta: Rake Sarasen, 1998), hal. 29

<sup>26</sup> Supandi dan Ahmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, (Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti P2LPTK, 1988), hal. 11. Sebagian penulis membedakan kata kebijakan dengan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa kebijaksanaan sepadan dengan *wisdom*, kebijakan adalah *policy*. Dalam kebijaksanaan terdapat pertimbangan perkecualian, sedang kebijakan merupakan keputusan yang disepakati secara umum tanpa perkecualian. Sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Bahkan ada yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal. 15-17. Dalam hal ini penulis tidak memaknai kata kebijakan secara terisolasi atau sendiri melainkan dirangkai dengan kata pendidikan sehingga menjadi ‘kebijakan pendidikan’.

<sup>27</sup> Noeng Muhadjir, *Metodologi*, hal. 29

<sup>28</sup> Supandi dan Ahmad Sanusi, *Kebijaksanaan*, hal. 15

sedang kriteria yang dipahami mungkin rasionalitas, prioritas atau kaidah konstitusi.<sup>29</sup>

Tahapan kebijakan meliputi penyusunan kebijakan (*policy formulation*), penerapan kebijakan (*policy implementation*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah difokuskan pada produk kebijakan dalam formulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, bukan proses penyusunan kebijakannya.

Sedangkan yang dimaksud sistem politik<sup>30</sup> dapat diartikan sebagai kumpulan-kumpulan pendapat, prinsip yang membentuk suatu kesatuan, yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan

---

<sup>29</sup> Noeng Muhadjir, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), hal. 59

<sup>30</sup> Kata politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*. Lihat, A.S. Hornby A.P. Cowic, (ed.), *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1996), hal. 893. Dalam kamus Inggris, kata politik diterjemahkan dengan “bijaksana” atau “dengan bijaksana”. Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1981), hal. 437. Kata ini terambil dari kata Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek), *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota. Lihat Noah Webster, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, (USA: William Collin Publisher, 1980), hal. 437. Politik kemudian diserap dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga digunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.” W.J.S. Poerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), hal. 763. Menurut Hassan Shadily, politik dilihat sebagai konsep yang berkenaan dengan soal-soal pemerintahan. Makna politik sebagai tipu muslihat atau kelecikan ternyata tak terpakai lagi. Lihat Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil. 5, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1983), hal. 273. Lihat juga, Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 694. Dengan demikian, yang dimaksud politik dalam tulisan ini, adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau sikap, yang bertujuan memengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan.

dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok atau negara dengan negara.<sup>31</sup>

Sistem politik dan kebijakan negara, termasuk kebijakan pendidikan saling berkait dan dapat dilihat pada dihasilkannya kebijakan-kebijakan pendidikan tersebut oleh sistem politik. Dengan kata lain, *out put* sistem politik itu salah satunya adalah kebijakan pendidikan. Dengan demikian, munculnya kebijakan pendidikan dan kebijakan-kebijakan negara yang lain adalah sebagai pertanda adanya sistem politik di negara tersebut, bahkan dapat dijadikan indikator dari eksistensi sistem politik tersebut. Sebab, politik itulah yang memungkinkan terbentuknya badan-badan yang memproduksi kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan.<sup>32</sup>

M. Sirozi menambahkan bahwa,<sup>33</sup> pada dataran kebijakan, sangat sulit memisahkan antara kebijakan-kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah di suatu negara dengan persepsi dan kepercayaan politik yang ada pada pemerintah tersebut. Begitu pula sebaliknya, implementasi dari suatu kebijakan pendidikan juga berdampak pada kehidupan politik.

Uraian tersebut menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling memengaruhi. Bahkan, karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap

---

<sup>31</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan*, hal. 21

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 12

kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya.<sup>34</sup>

Berbagai institusi pendidikan yang ada dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai alat kekuasaan dalam upaya membentuk sikap dan keyakinan politik yang dikehendakinya. Berbagai aspek pembelajaran, terutama kurikulum dan bahan-bahan bacaan, sering kali diarahkan pada kepentingan politik tertentu. Bahkan Elliot mengatakan bahwa salah satu komponen terpenting pendidikan, kurikulum, misalnya, dapat menjadi media sosialisasi politik.<sup>35</sup>

Adapun kebijakan politik pendidikan adalah kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya.<sup>36</sup> Dalam hal ini pemerintah kolonial Hindia Belanda yang mengatur pendidikan semasa kekuasaannya di Hindia Belanda.

Kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda merupakan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan sebelumnya yang telah dimulai oleh orang-orang Portugis.<sup>37</sup> Kebijakan pendidikan yang dirumuskannya sangat berhubungan erat dengan politik mereka pada umumnya. Setidaknya terdapat dua ciri pokok yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang diselenggarakannya, yakni ekonomi

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 17-18

<sup>35</sup> Thomas H. Elliot, "Toward an Understanding of Public School Politics", dalam *American Political Science Review*, Vo. 53, No. 4, December 1959, hal. 1047, seperti dikutip M. Sirozi, *Ibid.*, hal. 38. M. Sirozi menggambarkan bahwa di banyak negara totaliter dan negara berkembang, pemimpin politik sangat menyadari fungsi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan politik. Mereka melakukan berbagai cara untuk mengontrol sistem pendidikan dan menitipkan pesan-pesan politik melalui metode dan bahan ajar (*curriculum content*) pendidikan. Di negara-negara Komunis, misalnya, *brain washing* digunakan secara luas untuk membentuk pola pikir kaum muda, agar sejalan dengan doktrin komunisme.

<sup>36</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar*, hal. 115

<sup>37</sup> Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan*, hal. 9

dan penjajahan.<sup>38</sup> Kaitannya dengan ekonomi, kolonial mengeluarkan kebijakannya dengan berorientasi atas keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang akan diperolehnya. Jadi bukan berdasarkan kemanusiaan dalam menyelenggarakan sekolah-sekolah tersebut. Sedangkan kaitannya dengan orientasi penjajahan, yakni pemerintah Hindia Belanda dalam mendirikan sekolah-sekolah untuk pribumi sebenarnya dimaksudkan untuk mendidik rakyat agar tidak lebih daripada mampu memahami peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan begitu, mereka diharapkan oleh kolonial untuk dapat menaatinya, sehingga penjajahannya atas tanah Indonesia akan menjadi tetap lestari.

Dengan demikian sebagai bangsa penjajah, Belanda telah melakukan diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik secara sosial, rasial, politik maupun agama. Diskriminasi ini tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

#### 1. Diskriminasi Sosial

Diskriminasi sosial ini terlihat dari didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan untuk kaum bangsawan dengan sekolah untuk rakyat biasa. Untuk kaum bangsawan, didirikan Sekolah Raja (*hoofdenschool*) pada tahun 1865 dan 1872 di Tondano. Sedangkan untuk rakyat pribumi biasa didirikan Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Scholen der Tweede Klasse*) atau yang sering dikenal dengan istilah Sekolah Ongko Loro.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1990), hal. 10

<sup>39</sup> Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia*, hal. 52

## 2. Diskriminasi Rasial

Diskriminasi ini sangat jelas terlihat pada klasifikasi sekolah di Indonesia. Sebagai contoh, sekolah dasar bagi golongan Eropa adalah ELS (*Europeesche Lager School*), sedangkan Timur Asing adalah HCS (*Hollandsche Chinese School*). Begitu pula untuk golongan pribumi. Kelas Satu atau HIS (*Hollandsche Inlandsche School*) yang berbahasa pengantar bahasa Belanda diperuntukkan bagi anak-anak para bangawan, dan rakyat jelata hanya sebagian menikmati Sekolah Desa (*volkschool*).<sup>40</sup>

## 3. Diskriminasi Anggaran

Anggaran pendidikan, oleh kolonial Belanda, lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa, padahal jumlah siswa di sekolah-sekolah bumiputera lebih banyak. Pada 1909 di sekolah-sekolah bumiputera terdapat 162.000 siswa, sedangkan di sekolah Eropa hanya 25.000 siswa. Tetapi ironisnya, subsidi yang dialokasikan untuk sekolah bumiputera hanya f. 1.359.000, sementara untuk sekolah Eropa dua kali lebih banyak, yakni f. 2.667.000.

## 4. Diskriminasi dalam Hal Kepemelukan Agama

Kepemelukan terhadap suatu agama tertentu juga menjadi dasar kebijakan pendidikan Belanda. Program pendidikan pemerintah dikonsentrasikan di wilayah-wilayah di mana terdapat sejumlah besar penduduk yang beragama

---

<sup>40</sup> Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (Ed.), *Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hal. 247

Kristen, seperti Batak, Manado dan Kalimantan. Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama masyarakat muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali, bahkan cenderung dimusuhi. Dalam hal ini Belanda lebih memihak Kristen, kendati secara formal mereka netral terhadap agama.

Kebijakan yang diskriminatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial yang dicanangkan oleh mereka, yaitu:

1. Pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu
2. Pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan penjajah
3. Sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat
4. Pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial Belanda
5. Dasar pendidikannya adalah Barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan.<sup>41</sup>

Gambaran di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ki Suratman, sebagaimana dikutip Jalaluddin, yang menyimpulkan bahwa program pendidikan pemerintah kolonial Belanda bersifat heterogen (banyak ragamnya) dan diskriminatif.<sup>42</sup> Sedangkan S. Nasution mengatakan secara lebih lengkap mengenai ciri-ciri kebijakan pendidikan Hindia Belanda, yaitu:

---

<sup>41</sup> Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan*, hal. 11

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal. 11

1. Gradualisme yang luar biasa dalam penyediaan pendidikan bagi anak-anak Indonesia
2. Dualisme dalam pendidikan dengan menekankan perbedaan yang tajam antara pendidikan Belanda dan pendidikan pribumi
3. Kontrol sentral yang ketat
4. Keterbatasan tujuan sekolah pribumi, dan peranan sekolah untuk menghasilkan pegawai sebagai faktor penting dalam perkembangan pendidikan
5. Prinsip konkordansi yang menyebabkan maka sekolah di Indonesia sama dengan di negeri Belanda
6. Tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis untuk pendidikan pribumi.<sup>43</sup>

Prinsip politik pendidikan yang pertama yakni gradualisme, merupakan cerminan Belanda akan keengganan mereka menyediakan pendidikan bagi pribumi dan lebih suka membiarkan mereka tidak mengecap pendidikan. Keengganan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Robert van Neil, seperti dikutip Alwi Shihab, sejalan dengan keinginan mereka untuk tidak mengubah masyarakat pribumi sehingga mereka dapat lebih mudah lagi dieksploitasi.<sup>44</sup> Hal

---

<sup>43</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan*, hal. 20

<sup>44</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus*, hal. 215

ini terlihat bahwa pada tahun 1900 hanya seorang dari 35.000-36.000 orang Indonesia yang tamat sekolah rendah pemerintah.<sup>45</sup>

Prinsip gradualisme ini menjamin kedudukan yang menguntungkan bagi orang Belanda, karena pendidikan yang terlampau banyak hanya akan membahayakan bagi pemerintah Belanda. Pernyataan Colijn, seorang politikus Belanda sebelum Perang Dunia II, menganggap bahwa : "... Keinginan yang tak layak di kalangan banyak orang Jawa untuk memperoleh pendidikan lanjutan adalah bahaya besar bagi rencana-rencana pemerintah."<sup>46</sup>

Alasan-alasan seperti itulah yang menyebabkan perkembangan pendidikan bagi anak di Indonesia sangat lamban. Juga pada masa kemudian, setelah anak Indonesia mendapat kesempatan memasuki sekolah menengah dan perguruan tinggi, jumlah pelajar Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan anak Belanda bahkan anak Cina.

Prinsip dualisme adalah kata lain dari upaya pemerintah kolonial Belanda dalam menciptakan golongan-golongan penduduk berdasarkan pada keturunan, ras dan status. Dualisme ini menjadi ciri dominan dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Ada sekolah yang berbeda untuk golongan rasial dan sosial. Sistem pendidikan terbagi menjadi dalam dua kategori yang jelas. Sekolah

---

<sup>45</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan*, hal. 22

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 23

Belanda dan sekolah pribumi, masing-masing dengan inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, dan pembiayaan tersendiri.<sup>47</sup>

Ciri dualisme lain juga tercermin dalam pendidikan bagi anak Belanda dan anak Indonesia. Anak Belanda dari golongan sosial tinggi memasuki ELS (*Europeesche Lager School*) kelas satu, sedangkan anak-anak bukan Belanda golongan rendah memasuki sekolah Belanda (ELS ) *bukan kelas satu*. Diferensiasi serupa ini juga terdapat di kalangan pendidikan bagi anak Indonesia. Anak-anak desa memasuki Sekolah Desa (*volkschool*) dan mereka yang tinggal di kota serta pusat perdagangan dan industri memasuki Sekolah Kelas Dua (*Tweede Klasse School*).

Sedangkan kontrol sentral yang sangat kuat adalah keterlibatan pemerintah yang terlalu berlebihan. Singkatnya, segala soal mengenai sekolah, jenis sekolah, dan pengangkatan guru ditentukan oleh pemerintah pusat. Pemerintah memainkan peranan sangat penting dalam segala masalah pendidikan. Tak ada perubahan, betapapun kecilnya, tanpa persetujuan Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama atasannya. Orang Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan selama ini. Aspirasi pendidikan mereka baru diakomodasi untuk pertama kalinya dalam sejarah setelah terbentuknya *Volksraad* (Dewan Rakyat) pada tahun 1918.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> S. Nasution, *Sejarah Pendidikan*, hal. 24

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 28

Prinsip keterbatasan tujuan, artinya adalah bahwa pemerintah menyelenggarakan pendidikan bagi pribumi dimaksudkan untuk menciptakan pegawai-pegawai yang dibayar rendah. Semakin tinggi tuntutan akan pegawai yang ahli dalam bidang tertentu, semakin mendorong pemerintah untuk segera menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kebutuhan tersebut. Jadi, tujuannya akan selalu diiringi dengan pertimbangan praktis belaka, bukan didorong oleh pertimbangan-pertimbangan moral kemanusiaan.

Sementara prinsip konkordansi adalah refleksi dari pandangan kolonial Belanda akan superioritas budaya yang dimilikinya yaitu Barat. Tidak heran apabila Snouck Hurgronje dengan optimis melihat bahwa persaingan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan Islam di Indonesia pada akhirnya akan dimenangkan oleh kebudayaan Barat, karena Islam adalah agama beku dan penghalang kemajuan.<sup>49</sup>

Dengan demikian tujuan dari prinsip konkordansi adalah menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standar yang sama sebagaimana dengan sekolah-sekolah di negeri Belanda. Dengan lain kata, prinsip konkordansi ini adalah mengupayakan sekolah-sekolah di Hindia Belanda bersifat kebelanda-belandaan.

Prinsip tidak adanya perencanaan pendidikan yang sistematis bagi pribumi adalah berdasarkan akan kenyataan sekolah-sekolah yang diperuntukkan bagi pribumi yang banyak ragamnya (heterogen), di mana tidak adanya hubungan

---

<sup>49</sup> Harry J. Benda, *Christiaan Snouck Hurgronje*, hal. 135

organisasi antara satu dengan lainnya. Sekolah Desa untuk anak-anak di pedesaan, Sekolah Kelas Dua untuk anak-anak orang biasa tetapi berdomisili di daerah perkotaan, dan Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak bangsawan dan golongan elit lainnya.

Prinsip-prinsip kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda ini mereka tempuh karena mereka tidak ingin masyarakat pribumi menjadi pintar dan umat Islam menjadi maju. Atas kekhawatiran dan ketakutannya terhadap ancaman umat Islam suatu saat dapat meledak, maka pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan guna menghalangi kemajuan dan perkembangan agama Islam. Di antara kebijakan-kebijakan itu adalah:

1. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas untuk mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang mereka sebut *Priesterraden*. Dari nasihat badan inilah pada tahun 1905 pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru yang dikenal dengan nama Ordonansi Guru (*Goeroe Ordonantie*).
2. Pada tahun 1925 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Guru kedua yang isinya mewajibkan bagi setiap guru agama untuk melaporkan diri pada pemerintah secara berkala. Kedua Ordonansi ini dimaksudkan sebagai media pengontrol bagi pemerintah kolonial untuk mengawasi sepak terjang dan penganjur agama Islam di negeri ini.

3. Pada tahun 1932 pemerintah Belanda mengeluarkan Ordonansi Liar “Sekolah Liar” (*Ordonantie Wildescholen*). Ordonansi ini berisi kewenangan untuk memberantas dan menutup madrasah dan sekolah yang tidak ada izinnya atau sekolah yang memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh Belanda.<sup>50</sup>

Pembahasan mengenai ciri kebijakan pendidikan Belanda di atas menunjukkan bahwa pemerintah kolonial Belanda sepenuhnya mengendalikan proses produksi, isi dan penerapan kebijakan pendidikan. Kebijakannya tampaknya bukan hasil dari kesepakatan-kesepakatan antara rakyat jajahannya dengan pemerintah Belanda, melainkan atas kesewenang-wenangan Belanda sendiri.

Dari paparan mengenai kebijakan pendidikan kolonial Belanda beserta ciri-ciri yang terdapat di dalamnya, kemudian akan ditelusuri lebih jauh mengenai kebijakan-kebijakan pendidikan kolonial Belanda ini, untuk pada akhirnya akan dilihat bagaimana implikasinya bagi perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam pada masa itu yang merupakan kajian utama tesis ini.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dengan pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk membangun kembali data-data masa lalu mengenai kebijakan pendidikan yang pernah diterbitkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Oleh karena itu, sebagai studi historis, penelitian ini

---

<sup>50</sup> Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam*, hal. 51-58

menerapkan metode *dokumenter*, yakni menelaah arsip surat dan dokumen resmi, seperti Undang-undang, Surat Keputusan, dan peraturan-peraturan serta peninggalan lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan Hindia Belanda. Diperkirakan sumber-sumber *dokumenter* yang disebutkan ini akan sulit untuk didapatkan dalam bentuknya yang asli (sumber primer).<sup>51</sup> Mungkin di sinilah aspek kelemahan kajian ini. Namun agaknya kelemahan ini menjadi teratasi karena penulis merujuk kepada hasil-hasil karya yang berasal dari disertasi penulisnya, misalnya – untuk menyebut beberapa – oleh Husnul Aqib Suminto,<sup>52</sup> Maksun Mukhtar,<sup>53</sup> Zamakhsari Dhofier,<sup>54</sup> Deliar Noer,<sup>55</sup> Alwi Shihab<sup>56</sup> dan Karel A. Steenbrink.<sup>57</sup>

Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mengumpulkan data-data untuk mendapatkan gambaran umum tentang tema yang diangkat baik data yang berkaitan langsung maupun data yang mendukungnya. *Kedua*, melakukan pemetaan dan klasifikasi terhadap data yang

---

<sup>51</sup> Di antara sumber-sumber dokumenter tersebut, penulis lampirkan pada halaman lampiran yakni tentang Putusan Pemerintah untuk menyediakan biaya pendidikan bagi orang Indonesia untuk pertama kalinya, dan Putusan Pemerintah untuk memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah di daerah Timor.

<sup>52</sup> Husnul Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, (Jakarta:LP3ES, 1985)

<sup>53</sup> Maksun Mukhtar, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001)

<sup>54</sup> Zamakhsari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1982)

<sup>55</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet.VIII, (Jakarta: LP3ES, 1996)

<sup>56</sup> Alwi Shihab, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1998)

<sup>57</sup> Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet.II, (Jakarta: LP3ES, 1994)

sudah terkumpul untuk mendapatkan data yang benar-benar relevan dengan tema yang diangkat. *Ketiga*, menganalisis secara kritis terhadap data yang relevan tersebut untuk diangkat dalam bentuk tulisan yang runtut.

Sedangkan analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode deduktif (berpikir dari yang umum ke khusus), induktif (berpikir dari yang khusus ke umum)<sup>58</sup> dan – meminjam istilah Abdur Rahman Assegaf<sup>59</sup> – meta-analisis, yakni suatu bentuk kajian dalam analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian yang berkaitan. Dengan digunakannya metode-metode analisa ini terhadap berbagai produk kebijakan kolonial kemudian akan terlihat implikasi-implikasi yang ditimbulkannya terhadap pendidikan Islam yang ada pada masa itu.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: *pertama*, reduksi, yaitu menyeleksi data yang terkait dengan jalan mengurangi semaksimal mungkin data yang tidak relevan. *Kedua*, displai, yakni menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tampilan bagan atau tabel agar dapat diketahui kecenderungannya. *Ketiga*, sistematisasi, yakni melakukan analisa secara berurutan menurut periodisasinya, dan bertahap sesuai dengan perubahan yang terjadi. *Keempat*, kategorisasi, yakni pengelompokan atas bentuk atau pola tertentu.

---

<sup>58</sup> Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP-IKIP, 1982), hal. 52-53

<sup>59</sup> Abdur Rahman Assegaf, *Pergeseran Kebijakan*, hal. 16

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan kajian ini adalah sebagai berikut:

*Bab Pertama*, menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian yang Digunakan dan Sistematika Penulisan.

*Bab Kedua*, berupaya menggambarkan sistem pendidikan pemerintah Hindia Belanda baik dari aspek perkembangan maupun dari segi unsur-unsur pendidikan yang ada di dalamnya. Di antara hal-hal yang dibahas dalam *Bab Kedua* ini yaitu: kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam jenis-jenis lembaga persekolahan yang didirikannya, pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam kurikulum di lembaga-lembaga tersebut, dan pada metode pengajarannya yang sama sekali berbeda dengan yang ada dalam sistem pendidikan Islam. Kemudian pada bagian ini juga akan diabdikan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diterapkannya kebijakan-kebijakan politik pendidikan tersebut. Diharapkan pada pembahasan ini menjawab dari salah satu rumusan pokok permasalahan, yakni mengenai latar belakang munculnya kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda.

*Bab Ketiga*, secara khusus membahas kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda terhadap pendidikan Islam, yakni Ordonansi Guru dan Ordonansi Sekolah Liar. Bagian ini juga melihat bagaimana reaksi umat Islam terhadap diberlakukannya kebijakan-kebijakan tersebut. Kebijakan-

kebijakan yang berkaitan langsung dengan eksistensi pendidikan Islam ini penting diungkapkan, karena diasumsikan akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam yang tumbuh pada masa-masa tersebut.

*Bab Keempat*, mengungkapkan perkembangan dan pertumbuhan sistem pendidikan Islam baik pada masa sebelum abad ke-20, terlebih pada awal-awal abad-abad ke-20. Kemudian bagian ini juga menggambarkan lembaga pendidikan Islam baru, yakni madrasah dan jenjang-jenjang pendidikannya, kurikulum pendidikan Islam pada masa-masa pertumbuhannya dan metode mengajar yang diterapkan dalam sistem pendidikan Islam tersebut. Dari penelusuran terhadap perkembangan dan pertumbuhan pendidikan Islam masa-masa awal abad ke-20 itu, terlihat sejauhmana pengaruh dari kebijakan-kebijakan politik pendidikan yang dipaparkan pada *Bab Ketiga*.

*Bab Kelima*, menganalisa mengenai apa saja implikasi dari kebijakan-kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam pada waktu itu. Implikasi-implikasi tersebut terutama terlihat pada aspek-aspek kelembagaan, kurikulum, metode pengajaran dan pendidiknya.

*Bab Keenam*, berisi kesimpulan-kesimpulan yang mengandung jawaban terhadap rumusan-rumusan masalah pada *Bab Pertama* serta beberapa saran yang dapat diajukan, yang didasarkan pada hasil pembahasan bab-bab sebelumnya.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada Bab-bab yang lalu, maka bagian ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan yang dikemukakan pada Bab I. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan politik pendidikan kolonial Belanda, mulai dari pendidikan tingkat bawah sampai yang tertinggi tidaklah dimaksudkan untuk mencerdaskan orang-orang Indonesia, melainkan tak lebih daripada sekedar memberi kesempatan kepada keluarga golongan tertentu yang dipercaya untuk ikut serta mempertahankan kelangsungan kolonialnya. Hal ini terlihat jelas pada penyelenggaraan sekolah-sekolah yang tak lain dimaksudkan untuk mencetak tenaga menengah ke bawah untuk mengisi posisi-posisi pekerjaan di berbagai perkebunan dan pabrik-pabrik.
2. Faktor-faktor utama yang melatarbelakangi kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda yaitu:
  - a. Faktor politik, yakni suasana perpolitikan baik yang terjadi di Parlemen Belanda maupun di Hindia Belanda sendiri turut memengaruhi produk kebijakan pendidikan pemerintah kolonial;

- b. Faktor ekonomi, yakni pendirian sekolah-sekolah selalu didorong pertimbangan untung-rugi secara ekonomis bagi pemerintah Hindia Belanda;
- c. Faktor Kristenisasi, yaitu pendirian sekolah-sekolah berkait-kelindan dengan upaya-upaya Kristenisasi terhadap pribumi dan berusaha menyisihkan kekuatan Islam sebagai sebuah ideologi yang telah mengakar kuat dalam diri sebagian besar penduduk pribumi;
- d. Faktor rasialisme, adalah struktur sosial yang dibuat oleh kolonial dengan meletakkan bangsanya sendiri (Belanda) dan kulit putih lainnya, sebagai kelas yang tertinggi di dalam hierarki itu. Di bawahnya, masyarakat Indo-Belanda. Lalu berturut-turut ke bawahnya, masyarakat Timur Asing (Arab, Cina dan India), golongan priyayi dan terakhir berada dalam posisi terbawah adalah bumiputra yang disebut *inlanders*; dan
- e. Faktor situasi dan kondisi di Nederland (Belanda) sendiri, yaitu keadaan di negeri induknya, yakni Belanda, baik dari segi ekonomi maupun politik yang terjadi pada waktu itu, akan memengaruhi berbagai kebijakan pendidikan yang diterapkan di Hindia Belanda, sebagai negeri jajahannya;
- f. Faktor kondisi umat Islam Indonesia, yaitu fenomena umat Islam yang pada paruh kedua abad ke-19 sedang mengalami kebangkitan juga ikut menjadi pemicu pemerintah kolonial Belanda untuk menyainginya dengan banyak mendirikan sekolah-sekolah.

3. Implikasi-implikasi yang ditimbulkan bagi pendidikan Islam dari kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda di antaranya yaitu:
  - a. Aspek kelembagaan. Secara kelembagaan, dalam pendidikan Islam muncul lembaga pendidikan Islam baru yaitu madrasah dengan sistem modern. Padahal sebelum kedatangan kolonial Belanda, madrasah dengan sistem tersebut belum dikenal hingga pemerintah Hindia Belanda mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah. Namun, lembaga pendidikan Islam tradisional pesantren, justru mendirikan lembaga-lembaga pendidikannya di daerah-daerah pinggiran sebagai cermin dari sikap politik non-kooperatif ulama dengan Belanda, bahkan isolatif.
  - b. Aspek kurikulum. Semula Pendidikan Islam tidak mempunyai kurikulum yang terperinci dan teratur. Namun setelah umat Islam mengenal sistem pendidikan kolonial Belanda – sebagai wujud kebijakan pendidikannya, maka dalam sistem pendidikan Islam pun kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga menjadi teratur dan rinci serta memiliki alokasi waktu yang jelas. Implikasi selanjutnya yaitu, adanya upaya penyatuan atau kombinasi antara ilmu-ilmu keagamaan dengan ilmu-ilmu umum yang tersedia di sekolah-sekolah kolonial Belanda. Terintegrasinya dua “rumpun” keilmuan ini dimaksudkan untuk mengimbangi kurikulum sekuler kolonial yang semata-mata menyediakan ilmu-ilmu umum.

- c. Aspek metode pengajaran. Metode pengajaran yang sebelumnya menggunakan sistem hafalan, bandongan/halaqah dan sorogan/individual, diganti dengan metode pengajaran yang menekankan pada pemahaman siswa dan diterapkannya sistem klasikal atau berkelas-kelas. Batasan umur dalam suatu jenjang pendidikan juga digunakan, yang sebelumnya tidak mengenal batasan umur dalam suatu lembaga pendidikan Islam tradisional.
- d. Aspek pendidik. Implikasi kebijakan pendidikan kolonial Belanda pada aspek pendidik yakni guru agama Islam ini, telah mengalami pergeseran pandangan di dalam masyarakat muslim Indonesia terhadap kualifikasi yang melekat pada sosok pendidik ini. Unsur-unsur keshalehan, keturunan bergeser ke penekanan intelektual. Sedangkan hubungan guru murid yang dulu bersifat taat absolut kemudian menjadi kontraktual dan saklek.

## **B. Saran-saran**

Dari penelusuran kebijakan-kebijakan politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, terdapat beberapa hikmah yang bisa dipetik untuk dijadikan cerminan bagi pendidikan Islam di Indonesia ke depan. Adapun saran-saran yang dapat diajukan dapat dirumuskan dalam beberapa butir berikut ini:

1. Bagi pemerintah – dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama yang bertanggung jawab terhadap sistem pendidikan di Indonesia - hendaknya terus menerus berupaya memberikan kesempatan bagi

seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati pendidikan yang bermutu. Sebab, bukan rahasia lagi bahwa warisan pendidikan kolonial agaknya masih tetap mewarnai persepsi dan realitas dunia pendidikan kita. Lembaga-lembaga pendidikan yang bermutu selalu dimenangkan oleh kelas “menengah-atas”, yang karena kekuatan ekonomi mereka relatif baik, telah memberi peluang utama bagi kompetisi tersebut. Kesempatan pendidikan tetap didominasi oleh kelompok orang-orang yang kategorinya kurang lebih sama dengan masa kolonial. Bedanya yang paling utama hanyalah, bahwa jika pada masa kolonial kriteria terletak pada faktor ketentuan peraturan (politik) pemerintah kolonial, maka pada masa Indonesia sekarang, faktor kekuatan ekonomi dan barangkali juga “kemampuan” (prestasi) yang menjadi kriterianya.

2. Bagi para penyelenggara pendidikan Islam, hendaknya bersedia membuka diri dan mau menata kembali lembaga pendidikannya, sehingga mampu menangkap nilai-nilai Islam secara utuh ke dalam rumusan yang mampu berdialog dengan perubahan sosial.
3. Bagi perumus kurikulum, hendaknya dalam menyusun kurikulum semua disiplin keilmuan diletakkan ke dalam suatu integrasi yang benar-benar kukuh, sehingga antara satu dengan yang lainnya terjadi hubungan interdependensi yang kukuh di bawah cahaya nilai-nilai Islam.
4. Bagi para pendidik, di dalam menggunakan metode pengajarannya, hendaknya menggunakan pendekatan yang merangsang aspek penalaran peserta didik untuk menggantikan pendekatan pengajaran yang bersifat

dogmatis atau doktriner – yang masih dominan di lembaga-lembaga pendidikan Islam saat ini, sehingga diharapkan dapat membuka eksplorasi cakrawala pemikirannya dan pada gilirannya lebih lanjut, diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia kreatif-kritis-inovatif yang digerakkan oleh semangat nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abaza, Mona, *Pendidikan Islam dalam Pergeseran Orientasi: Suatu Kasus Alumni al-Azhar*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- \_\_\_\_\_, *School and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera (1927-1933)*, Ithaca: Cornell Indonesia Project, 1971.
- Alfian, Ibrahim, *Perang di Jalan Allah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.
- Ali-Fauzi, Ihsan, "Pola-pola Persepsi Belanda terhadap Islam di Indonesia", dalam *Studia Islamika: Journal for Islamic Studies*, Vol. 3, No. 3, Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1996.
- Amin, M. Masyhur, *Dinamika Islam (Sejarah Transformasi dan Kebangkitan)*, Yogyakarta: LKPSM, 1995.
- Anam, Chairul, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Solo: Penerbitan Jatayu, 1985.
- Anis, Ibrahim dkk., *Al-Mu'jam al-Wasit*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- Arifin, H.M., *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet.IV, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Asrahah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Assegaf, Abdur Rahman, "Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1994", *Disertasi*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Atjeh, Abu Bakar, *Sekitar Masuknya Islam ke Indonesia*, Semarang: Ramadhani, 1971.
- Azra, Azyumardi, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII: Melacak Akar-akar Pembaruan Pemikiran Islam di Indonesia*, Cet.III, Bandung: Mizan, 1995.

- Azra, Azyumardi, "The Surau and the Early Reform Movement in Minangkabau," *Majalah Mizan*, Vol.III, No.2 Tahun 1990, 64-85.
- \_\_\_\_\_, *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Jakarta: Logos, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Barnadib, Imam, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: FIP-IKIP, 1982.
- Barnadib, Sutari Imam, *Sejarah Pendidikan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Benda, Harry J., "Christiaan Snouck Hurgronje dan Landasan Kebijakan Belanda Terhadap Islam di Indonesia", dalam Ahmad Ibrahim dkk., *Islam Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, Alih bahasa A. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Bradjanegara, Sutedjo, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Yogyakarta: t.t.t., 1956.
- Dahm, Bernard, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, New York: Praeger Publisher, 1971.
- Daulay, Haidar Putra, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren, Sekolah dan Madrasah*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001.
- Dawam, Ainurrafiq dan Ahmad Ta'arifin, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Cet.II, Yogyakarta: Listafariska, 2005.
- Daya, Burhanuddin, *Gerakan Pembaharuan Pemikiran Islam: Kasus Sumatera Thawalib*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- \_\_\_\_\_, *Education in Indonesia Throughout the Centuries*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Dhofier, Zamakhsari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES, 1982.

- Djaelani, H.A. Timur, *Peningkatan Mutu Pendidikan dan Pembangunan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Darmaga, 1983.
- Djojonegoro, Wardiman, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Depdikbud, 1996.
- Djumhur, I. dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, Bandung: CV Ilmu, 1976.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Ekadjati, Edi S. dkk., *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*, Jakarta: Depdikbud, 1998.
- Elliot, Thomas H., "Toward an Understanding of Public School Politics", dalam *American Political Science Review*, Vo. 53, No. 4, December 1959, 1047
- Faisal, Jusuf Amir, *Reorientasi Pendidikan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Gibb, H.A.R. dan H. Kramers, *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden: E.J. Brill, 1981.
- Gunawan, Ary H., *Kebijakan-kebijakan Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995.
- Hadimulyo, "Dua Pesantren Dua Wajah Budaya", dalam Dawam Rahardjo (Ed.), *Pergulatan Dunia Pesantren: Membangun dari Bawah*, Jakarta: P3M, 1985.
- Hak, Nurul, "Sistem Pendidikan Islam di Indonesia Awal Abad Ke-20: (Kajian Historis terhadap Perkembangan Sistem Pendidikan)", dalam Abdurrahman Assegaf, *Pendidikan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Suka Press, 2007.
- Haris, Noor, "Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1990)", *Tesis*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*, Cet.III, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999.
- Hasymi, A. (Peny.), *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Bandung: Al-Ma'arif, 1989.
- Hornby A.P. Cowic, A.S. (ed.), *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1996.

- Hurgronje, C. Snouck, "Pengajaran selain Pengajaran Muhammadiyah", dalam Gobebe dan Adriansee, *Nasihat-nasihat Hurgronje semasa Kepegawaiannya kepada Pemerintah Hindia Belanda*, 7:1187, Jakarta: INIS, 1992.
- Husein, Machnun, *Pendidikan dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Imron, Ali, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Ismail, Taufik, "Pencucian Citra SDM Warisan Kolonial, Peletakan Paradigma SDM Baru: Mungkinkah?", *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol.V, No. 1, Agustus, 2005, 1-22.
- Jalaluddin, *Kapita Selekta Pendidikan: Suatu Telaah Konsep Pembaharuan di Zaman Kolonial Belanda*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990.
- \_\_\_\_\_, "Kata Pengantar", dalam M. Sirozi, *Politik Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Kartodirdjo, Sartono, "Pemberontakan Petani Banten Tahun 1888: Kebangkitan Kembali Agama", dalam Ahmad Ibrahim, Sharon Siddique dan Yasmin Hussain, (Ed.), *Islam di Asia Tenggara: Perspektif Sejarah*, Alih bahasa A. Setiawan Abadi, Jakarta: LP3ES, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Nasional Indonesia*, Yogyakarta: Balai Pustaka, 1977.
- Khalid, Idham, *Gerakan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia Awal Abad XX: (Seri Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia)*, Bandarlampung: IAIN Raden Intan, 1997.
- \_\_\_\_\_, "Pendidikan Agama dan Politik Islam Hindia Belanda (Pendidikan Islam Zaman Kolonial Belanda: Sebuah Tinjauan Historis)", *Jurnal Pendidikan Islam Fakta*, Edisi 11, Bandarlampung: IAIN Raden Intan, 1996, 35-43.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Langgulung, Hasan, *Beberapa Pemikiran tentang Pendidikan Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Latief, Hilman, "The Reinvigoration of Pesantren: The Social and Political Role of Kyai and Ulama in the Dutch Kolonial Era", *Jurnal Studi Agama Millah*, Vol. III, No. 1, Agustus, 2003, 66-75.

- Maarif, Ahmad Syafi'i, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1985.
- Madjid, Nurcholish, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemoderenan*, Cet. IV, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000.
- Makmur, Djohan (Ed.), *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan*, Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993.
- Mashuri, "Pola Pemikiran Baru dan Pengaruhnya: Prolog Kebangkitan Nasional", dalam Lembaga Research Kebudayaan Nasional, *Penelitian Perkembangan Pemikiran Sosial Politik (Periode 1908-1928)*, Jakarta Selatan: Widya Graha, 1985.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem Pendidikan Pesantren*, Jakarta: INIS, 1994.
- Mochtar, Affandi, "Tradisi Kitab Kuning: Sebuah Observasi Umum", dalam Sa'id Aqiel Siradj dkk., *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Mohammad AR., "The Curriculum of Islamic Studies in Traditional and Modern Dayahs in Aceh: a Comparative Study", *Journal Islamic Studies Al-Jami'ah*, Vol. 39, No. 1, Januari-Juni 2001, 62-96.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Kebijakan*, Yogyakarta: Rake Sarasen, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.
- Muhaimin dan Abdul Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, Bandung: Trigenda Karya, 1993.
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Muhammad, Husein, "Kontekstualisasi Kitab Kuning: Tradisi Kajian dan Metode Pengajaran", dalam Sa'id Aqiel Siradj, *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Mukhtar, Maksum, *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

- Mulkhan, Abdul Munir, *Islam Murni dalam Masyarakat Petani*, Yogyakarta: Bentang, 2000.
- Munawaroh, Djunaidatul, “Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren”, dalam Abudin Nata (Ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Mustafa, H.A. dan Abdullah Aly, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 1998.
- Nagazumi, Akira, *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia Budi Utomo 1908-1918*, Jakarta: Grafiti Press, 1989.
- Nasution, S., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Cet.II, Bandung: Jemmars, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Asas-asas Kurikulum*, Bandung: Jemmars, 1990.
- Navis, AA, “Tiga Ragam Pendidikan yang Terlupakan”, *Kompas*, 1 Januari 2000.
- Neil, Robert van, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Alih bahasa Zahara Deliar Noer, Jakarta: Pustaka Jaya, 1984.
- Nizar, Samsul, *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia*, Jakarta: Quantum Teaching, 2005.
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Cet.VIII, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Poerbakawatja, Soegarda, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gunung Agung, 1960.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Pendidikan*, Jakarta: Gunung Agung, 1976.
- Poerdawarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Prijono, “Riwayat Penjajahan Barat dan Perlawanan Umat Islam”, dalam *Beberapa Peninggalan dari Sejarah Perjuangan Islam*, Jakarta: t.p., 1945.

- Rasi'in, "Pendidikan Islam di Indonesia pada Zaman Belanda", dalam Abuddin Nata (Ed.), *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa Bandung, 2003.
- Ricklefs, M.C., *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Cet.II, Alih bahasa Satrio Wahono dkk., Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Rooijackers, Ad., *Mengajar dengan Sukses: Petunjuk untuk Merencanakan dan Menyampaikan Pengajaran*, Jakarta: Grasindo, 1991.
- Rukiati, Enung K. dan Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Ruswan, "Kolonial Experience and Muslim Educational Reforms: A Comparison of the Aligarh and the Muhammadiyah Movements", *Tesis M.A.*, Canada: Institut of Islamic Studies McGill University Montreal, 1997.
- Saerozi, Muh, "Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme: Telaah Hostoris atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia", *Disertasi*, Yogyakarta: PPs UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Said, M., *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaanannya*, Jakarta: Mutiara, 1981.
- Saidi, Ridwan, *Pemuda Islam dalam Dinamika Politik Bangsa 1925-1984*, Jakarta: Rajawali, 1984.
- Sanusi, Supandi dan Ahmad, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Dikti P2LPTK, 1988.
- Shadiliy, Hassan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jil. 3 dan 5, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1982.
- Shihab, Alwi, *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah Terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sirozi, Muhammad, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No.2/1989*, Alih bahasa Lillian D. Tedjasudhana, Jakarta: INIS, 2004.
- \_\_\_\_\_, M., *Politik Pendidikan*, Cet. II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soenarwan, *Pengajaran Individual dan Klasikal*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982.

- Steenbrink, Karel A., "Religion and Education in a Changing Indonesia", *The Indonesian Journal for Muslim Culture*, Vol.1, No.2, 2001, 9-28.
- \_\_\_\_\_, *Beberapa Aspek tentang Islam di Indonesia Abad Ke-19*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Steenbrink, Karel A., *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, Cet.II, Jakarta: LP3ES, 1994.
- Suharto, Edi, *et.al.* (Ed.), *Rekonstruksi dan Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Global Pustaka Utama bekerjasama dengan Corpus, 2005.
- Sukamto, *Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren*, Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sumardi, Mulyanto, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia (1945-1975)*, Jakarta: Dharma Bhakti, 1978.
- Suminto, Husnul Aqib, "Kata Pengantar Panitia", dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution Bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- \_\_\_\_\_, "Politik Islam Hindia Belanda Het Kantoor Voor Inlandsche Zaken (1899-1942)", dalam *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*, Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution Bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- \_\_\_\_\_, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta:LP3ES, 1985.
- Supartono, A dan L Rahman, "Studi Indonesia di Rusia: Sebuah Rumah Sejarah yang Alpa Disinggahi", *Kompas*, 6 Juli 2001
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemukan Sejarah: Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996.
- Suryosubroto, *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Suwendi, *Sejarah dan Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.

- Tarmi, “Kebangkitan dan Perkembangan Madrasah di Indonesia”, dalam Abudin Nata (Ed.), *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Lembaga-lembaga Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Tauhid, Moch., *Masalah Pendidikan Rakyat*, Bogor: Partai-partai Sosialis Indonesia Bagian Pendidikan dan Penerangan, 1954.
- Thoyyib, Ruswan, “Kolonialisme dan Pembaharuan Pendidikan Islam di India dan Indonesia”, dalam Dody S. Truna dan Ismatu Ropi (Ed.), *Pranata Islam di Indonesia: Pergulatan Sosial, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Tim Dosen IAIN Sunan Ampel Malang, *Dasar-dasar Kependidikan Islam*, Surabaya: Karya Abditama, 1996.
- Tim Penyusun, *Ensiklopedi Islam*, Jilid 4, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi pertama Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- \_\_\_\_\_, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jil. 3 dan 7, Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1989.
- Truna, Dody S. dan Ismatu Ropi (Ed.), *Pranata Islam di Indonesia (Pergulatan Sosial, Politik Hukum dan Pendidikan)*, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Vastenhouw, M., *Sejarah Pendidikan Indonesia*, Bandung: Jemmars, 1977.
- Vlekke, Bernard, *Nusantara: A History of Indonesia*, Chicago: Quadrangle Books, 1960.
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi: Esei-esei Pesantren*, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Walidain, Warul, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1988.
- Webster, Noah, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, USA: William Collin Publisher, 1980
- Wertheim, W.F., *Masyarakat Indonesia dalam Transisi: Kajian Perubahan Sosial*, Alih bahasa A.F. Husein, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.

- Whalley, Lucy A., "Meletakkan Islam ke dalam Praktik: Perkembangan Islam dalam Perspektif Gender di Minangkabau", dalam Mark R. Woodward (Ed.), *Jalan Baru Islam: Memetakan Paradigma Mutakhir Islam Indonesia*, Alih bahasa Ihsan Ali-Fauzi, Bandung: Mizan, 1998.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Cet.16, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Yunus, Mahmud, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, Cet.IV, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1995.
- Zamiek, Manfred, *Pesantren dalam Perubahan Sosial*, Alih bahasa Butche B. Soendjono, Jakarta: LP3ES.
- Zed, Mestika, "Pendidikan Kolonial dan Masalah Distribusi Ilmu Pengetahuan: Suatu Perspektif Sejarah", *Jurnal Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*, No. 1, Jakarta: PT Gramedia, 1991, 17-31.
- Zuhairini dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1986.
- \_\_\_\_\_, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Zuhri, Saefuddin "Pendidikan Pesantren di Persimpangan Jalan", dalam Sa'id Aqiel Siradj dkk., *Pesantren Masa Depan: Wacana Pemberdayaan dan Transformasi Pesantren*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Zuhri, Saifudin, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **Identitas Diri**

N a m a : **Maftuh, S.Pd.I, M.S.I.**

Tempat/tgl. Lahir : Serang, 25 Desember 1978

NIP : 150 344 101

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/IIIb

Jabatan : Guru Madya pada MTs Al-Khairiyah Macute Mancak Kab.  
Serang Banten

Alamat Rumah : Jl. Sunan Bonang, Link. Keracak RT/RW. 016/004, Kel.  
Banjarnegara, Kec. Ciwandan Kota Cilegon Banten

Email : [maftuh\\_krck@yahoo.co.id](mailto:maftuh_krck@yahoo.co.id)

HP : 08569005235

Alamat Kantor : Jl. Raya Panenjoan KM. 01 Mancak Kab. Serang

Nama Ayah : Ajma'in, A.Ma.

Nama Ibu : Bahriyah

Nama Istri : Rohmah Fikriyah, SEI

Nama Anak : Aulia Nazwa Maftuh

### **Riwayat Pendidikan**

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Keracak lulus tahun 1990
  - b. MTs Al-Hidayah Kubang Welut lulus tahun 1993

- c. MAN Cilegon lulus tahun 1996
- d. Strata Satu (S1) IAIN Raden Intan Bandarlampung lulus tahun 2002
- e. Strata Dua (S2) MSI UII Yogyakarta lulus tahun 2008
- f. Strata Dua (S2) PPs UIN Sunan Kalijaga tahun 2007 sampai dengan sekarang.

## 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Madrasah Diniyah Al-Khairiyah Banjarnegara I lulus tahun 1991
- b. KIM College English Course tahun 1995
- c. Lembaga Bahasa LIA Afiliasi Bandarlampung tahun 1997
- d. Short Course “Metodologi Penelitian Sosial, Budaya dan Agama” Dialogue Centre PPs UIN Sunan Kalijaga tanggal 1-2 Mei 2008
- e. Kursus Internet pada e-Fac tahun 2008
- f. Kursus Bahasa Jerman pada Pusat Bahasa dan Budaya UIN Sunan Kalijaga tahun 2008
- g. Pelatihan Bahasa Arab Pusat Bahasa dan Budaya UIN Sunan Kalijaga tanggal 17-25 Juni 2008
- h. Pelatihan Bahasa Inggris Pusat Bahasa dan Budaya UIN Sunan Kalijaga tanggal 26 Juni-4 Juli 2008.
- i. Mahasantri Ma’had Aly Pondok Pesantren Ali Maksum Krpyak dari tahun 2008.

### **Riwayat Pekerjaan**

1. Guru pada MTs Al-Khairiyah Kracak dari tahun 1997 sampai sekarang
2. Guru pada MD Al-Khairiyah Banjarnegara I dari tahun 1997 sampai sekarang
3. Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dari tahun 2002-2007
4. Kepala Sekolah SMA Al-Khairiyah 4 Cilegon dari tahun 2003-2004
5. Instruktur Bahasa Inggris LPK Global Cilegon dari tahun 2005 sampai 2007
6. Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2005
7. Pegawai Negeri Sipil dari tahun 2006 sampai sekarang.

### **Riwayat Organisasi**

1. Ketua Remaja Islam Masjid (RISMA) Nurul Falah dari tahun 2002 sampai dengan 2005
2. Sekretaris Komite SDN Keracak dari tahun 2002 sampai dengan 2007
3. Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dari tahun 2002 sampai dengan 2007

### **Karya Ilmiah**

1. “Pengaruh Sistem Pendidikan Kolonial Belanda terhadap Sistem Pendidikan Islam di Indonesia 1900-1942 (Suatu Tinjauan Historis)”, *Skripsi*, tahun 2002
2. “Menata Ulang Konsep dan Praktik Pendidikan Islam: Upaya Membangun Paradigma Pendidikan Islam Berwawasan Semesta”, *Majalah Dinamika Umat*, Edisi 43/V, (Juni, 2006)
3. “Menyiasati Kekurangan Jam Pelajaran Pendidikan Agama di Sekolah”, *Majalah Dinamika Umat*, Edisi 50/VI, (Januari, 2007)

4. “Problematika Dikotomi Pendidikan Islam dalam Pandangan Isma’il Raji al-Faruqi”, *Tesis*, tahun 2008
5. “Guru di Tengah Arus Era Reformasi”, *Majalah Dinamika Umat*, Edisi 69/VII, (Agustus, 2008).

Yogyakarta, Mei 2009

**Maftuh, S.Pd.I., M.S.I.**  
**NIM. 07.223.784**